

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta; Ull press.
- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Bagir Manan, 1995. *Ketentuan-Ketentuan mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta.
- Dwi Haryadi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Pres Bangka Belitung.
- Eny Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta; UNY Pres.
- Hadin M. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar konteks Untuk Indonesia*. Yogyakarta; Genta Publising.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Admnistrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung; Alumni.
- Irwansyah. 2020. *“Kajian Ilmu Hukum”*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Irwanasyah. 2021. *“Peneltian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel “*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.



Jhonny Ibrahim, (2013), *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Malang: Bayumedia.

Nandang Sudrajat, (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta; PT Buku Seru.

Ridwan HR, (2018). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Cetakan 15. Depok; Rajawali Pres.

Ronny Hanitijo Soemitro, (1990) *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia,

Salim HS, (2007). *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sigit Pramukti Angger. & Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta; PT Buku Seru.

Yunus Wahid, (2020), *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta; Pramedia Group.

Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum tata Ruang*. Jakarta; Pramedia group.

Zulkifli Aspan. 2021. *Amdal, Izin Lingkungan, dan Penegakkan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta; Mega Cakrawala.

2. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Siyamul Lailiya, 2019, *Penegakkan Hukum Administrasi terhadap Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup*, Universitas Jember.



Putri Wahyuni, 2022, *Pengelolaan Pulau Kecil Berbasis Pariwisata: Kasus Dipulau Pahawang, Kabupaten Pesawarang, Provinsi Lampung*, Universitas Lampung.

3. Jurnal/Artikel

Dwi Tuti M, Rini Heryanti B, Indah Dhian A, 2016, *Pengaturan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Sengketa Usaha Pertambangan*, Jurnal dinamika sosial budaya, volume 8 nomor 1.

Lathif.N., (2017), *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Privinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 2 Nomor 2.

Lutfulloh Z dan Wahyu D., 2021, *Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangehe*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 47 Nomor 2.

Papendang M.Y, Ronny A.Maramis, Dani R.Pinasang, 2023, *Pemberian Izin Pertambangan Pada Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Era Otonomisasi*. Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 3.

Redi.A., Luthfi M., 2021, *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2.

iomba R.M., 2011, *Kearifan local dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal hukum, Volume 18 Nomor 3.



Wardi R., Musrifin G., Mubarak, 2017, *kondisi Fisika-kimia Perairan Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara*, Jurnal Lingkungan Indonesia, Volume 4 Nomor 1.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undnag Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolahn Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undnag-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruaan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2041.

Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tatat Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan.



5. Putusan

Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/HUM/2022.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha 2 Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-XXI/2023.

6. Berita atau Internet

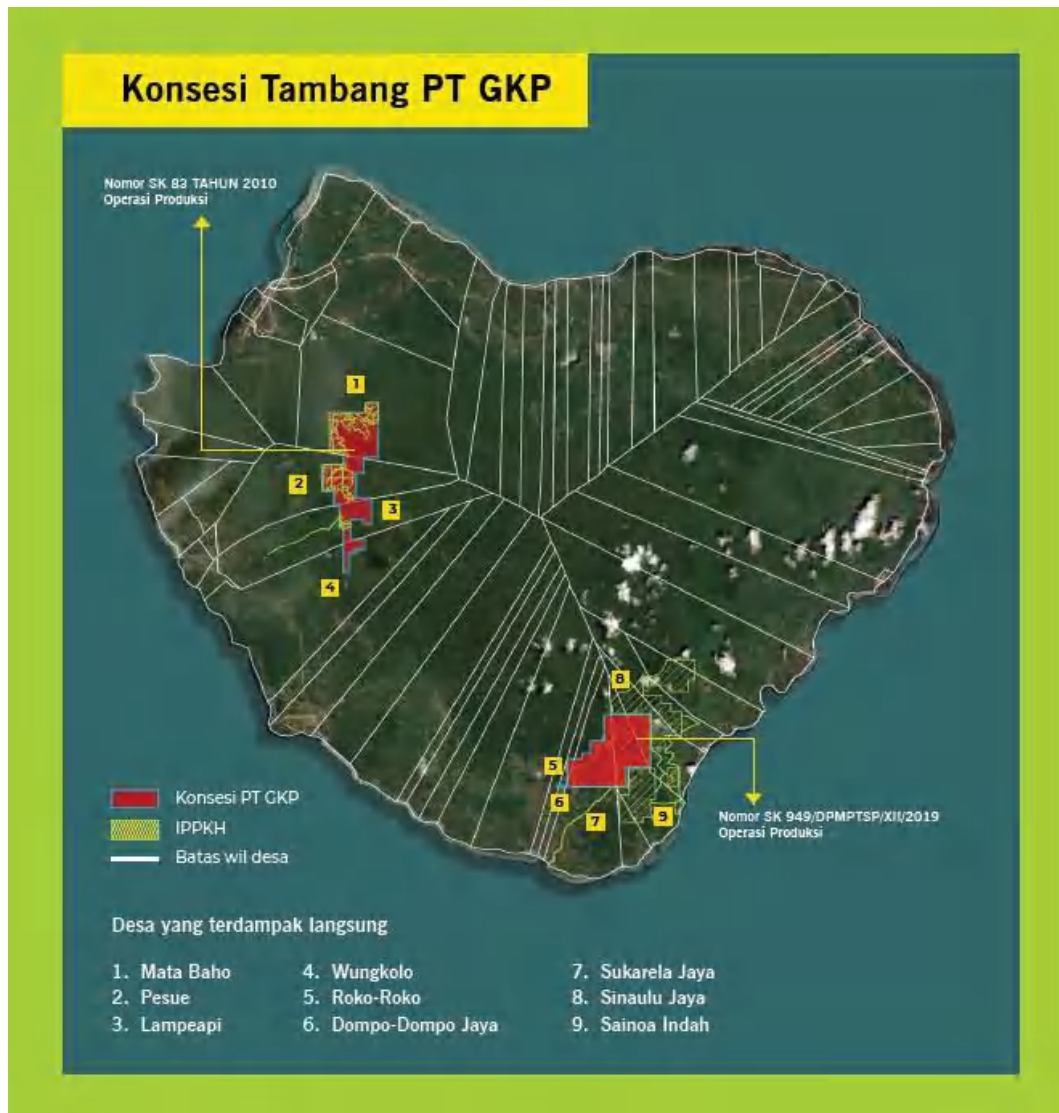
<https://www.walhi.or.id/wawonii-pulau-kecil-bukan-untuk-tambang-cabut-izin-pt-gema-kreasi-perdana>. Diakses 20 November 2023.

<https://www.walhi.or.id/dampak-pertambangan-nikel-terhadap-pulau-wawonii>. Diakses 20 November 2023.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta PT Gema Kreasi Perdana (GKP)





Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2.1 (Dinas Lingkungan Hidup)



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran 2.2 (Kepala Desa Roko-roko)



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran 3. Aktivitas PT GKP



Optimized using
trial version
www.balesio.com